



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JEMAJA

Tahun

2025 - 2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KATA PENGANTAR

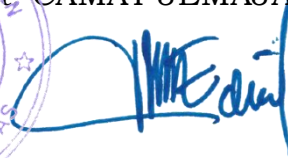
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja periode 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Jemaja dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Renstra ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus memperhatikan potensi lokal dan aspirasi masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, ide, maupun data yang relevan. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengoptimalkan potensi Kecamatan Jemaja sekaligus menghadapi tantangan yang ada selama lima tahun mendatang. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jemaja.

Tarempa, 8 September 2025



Pt. CAMAT JEMAJA,


Edison Z, S.Pd.SD
Penata Tk.I
NIP. 197006161993041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Aparatur.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24
2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan dan Sasaran	37
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	41
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	49
BAB V	
PENUTUP	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	13
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	14
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	14
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung.....	146
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas	18
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	20
Tabel 2.7	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
Tabel 3.1	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	38
Tabel 3.2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	39
Tabel 4.3	
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jemaja	43
Tabel 4.5	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah	50
Tabel 4.6	
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	50
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja.....	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kecamatan Jemaja merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik. Sebagai kecamatan yang didominasi oleh wilayah kepulauan, Kecamatan Jemaja menghadapi tantangan dalam aksesibilitas, distribusi layanan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan strategis yang terarah dan berkelanjutan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, Kecamatan Jemaja juga menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, dan kebutuhan akan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perencanaan strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai tindak lanjut dari mandat perencanaan pembangunan daerah yang diatur



dalam peraturan perundang-undangan. Renstra Kecamatan Jemaja periode 2025–2029 menjadi dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas kecamatan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Jemaja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jemaja setiap tahunnya. Selain itu Renstra Kecamatan Jemaja menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Jemaja baik untuk evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Potensi lokal Kecamatan Jemaja, seperti sektor perikanan, pariwisata bahari, dan kearifan lokal, menjadi keunggulan yang harus dioptimalkan. Namun, potensi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap pasar, dan risiko perubahan iklim. Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk pembangunan kecamatan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Jemaja dapat bekerja sama secara sinergis dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya bersama dalam menghadirkan perubahan



positif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan diganti menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ...);
 26. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja periode 2025–2029 memiliki maksud utama sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan



bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah secara efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan utama penyusunan Renstra ini adalah untuk menyelaraskan visi dan misi Kecamatan Jemaja dengan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini bertujuan agar setiap program kerja kecamatan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Secara khusus, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Jemaja selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.
4. Membangun sistem perencanaan yang akuntabel dan transparan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



5. Mendorong implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Kecamatan Jemaja, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Jemaja periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan, identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Kecamatan Jemaja, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Kecamatan Jemaja, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan, indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam



lima (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jemaja memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Jemaja menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;



- h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Camat

Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Membantu camat dalam koordinasi administrasi, yang terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan

3. Seksi-seksi Teknis

Melaksanakan tugas-tugas teknis kecamatan, yang meliputi:

- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pelayanan Umum

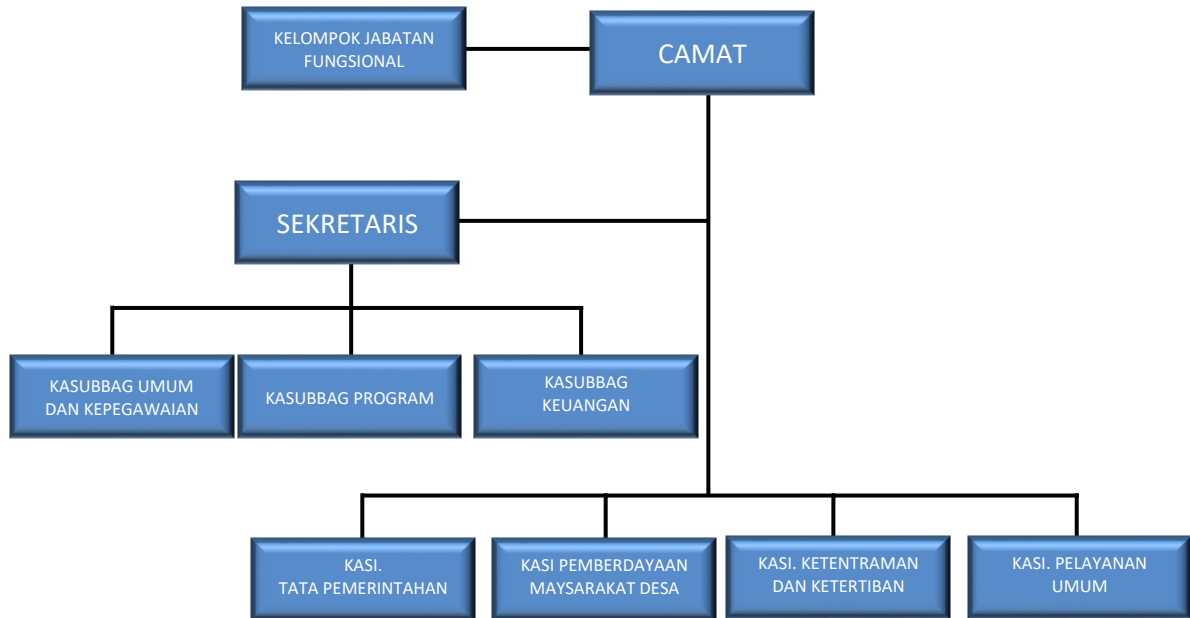
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mendukung pelaksanaan tugas tertentu berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing. Lebih lanjut Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah



ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja
Kabupaten Kepulauan Anambas



2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Jemaja Per Januari 2025 berjumlah 52 (lima puluh Dua) orang terdiri dari 23 Pegawai Negeri Sipil dan 29 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Jemaja Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :



Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina	Eselon III.a	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon III.b	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	4 Orang
Penata	Eselon IV.a	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.b	2 Orang
Penata	Eselon IV.b	2 Orang
Penata Muda Tk.I	Eselon IV.b	2 Orang
Penata	Staf	1 Orang
Penata Muda Tk.I	Staf	1 Orang
Penata Muda	Staf	4 Orang
Pengatur Tk.I	Staf	1 Orang
Pengatur	Staf	3 Orang
PPPK	Staf	29 Orang
Jumlah		52 Orang

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Jemaja tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :



Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	ASN : 23 Orang	S2 : 0 Orang
		S1 : 12 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 9 Orang
2	PPPK : 29 Orang	S1 : 16 Orang
		D3 : 1 Orang
		SMA/SMK : 12 Orang
Jumlah		52 Orang

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Jemaja didominasi kaum perempuan yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	12	11
PPPK	12	17
Jumlah	24	28

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Kecamatan Jemaja. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya



manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan PPPK ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Kecamatan Jemaja diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.



Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Filing Cabinet Besi	2 Unit	2019
2	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	2019
3	Kipas Angin	1 Unit	2019
4	Laptop	6 Unit	2019
5	Note Book	1 Unit	2019
6	Printer	5 Unit	2019
7	Meja Kerja Eselon III	1 Buah	2020
8	Meja Kerja Non Struktural	5 Buah	2020
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah	2020
10	Kursi Staf	5 Buah	2020
11	Lemari Arsip	4 Buah	2020
12	PC	2 Unit	2020
13	Laptop	2 Unit	2020
14	Printer	3 Unit	2020
15	Kursi Staf	5 Buah	2020
16	CCTV	5 Unit	2021
17	Peralatan Studio (Sound System)	7 Unit	2021
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8 Unit	2021
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	2021
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8 Buah	2021
21	Power Mixer	1 Unit	2021
22	PC	2 Unit	2021
23	Laptop	2 Unit	2021
24	Webcam	1 Unit	2021

2.3 Kinerja Pelayanan

Kecamatan Jemaja terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan informasi publik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Jemaja juga mengembangkan



pendekatan yang berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Kecamatan Jemaja aktif dalam membina dan mendampingi desa-desa di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti kegiatan jemput bola untuk pengurusan dokumen, telah menjadi salah satu langkah inovatif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan sinergi antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat, Kecamatan Jemaja menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas dan inklusif.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jemaja
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	-	-	-	(79,60)	-	-	-	-	-	92,56 %	-	-
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	-	-	20%	40%	60%	100%	-	-	20%	40%	-	-	-	-	100%	100%	-	-
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-



Kinerja Kecamatan Jemaja terus menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Berdasarkan data indikator kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi belum terukur. Hal ini disebabkan Kecamatan Jemaja belum termasuk ke dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 mencapai nilai 79,60 dari target 86,00. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kecamatan Jemaja dalam memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat sebesar 92,56 %.

Dalam mendukung pembangunan desa, Kecamatan Jemaja telah menargetkan peningkatan persentase desa berkembang menuju desa mandiri, yang dimulai pada tahun 2025 dengan capaian awal sebesar 20% dan direncanakan mencapai 100% pada tahun 2026. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tetap menjadi prioritas utama, dengan target partisipasi mencapai 100% setiap tahun hingga tahun 2026. Data ini menggambarkan komitmen Kecamatan Jemaja untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi yang kuat dalam setiap program pembangunan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jemaja, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Jemaja Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.593.300.210	5.054.461.028	5.396.789.301	5.442.331.736	5.518.161.572		5.306.412.331	4.966.616.786	5.129.200.593	4.655.142.007	-	-	94,87 %	98,26 %	95,04 %	85,54 %	-	-	-0,16 %	-4,12 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	-	-	-	250.000	52.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20700 %	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.285.548.333	623.047.482	1.346.499.659	1.057.176.559	1.366.493.472		976.081.956	617.010.467	861.946.160	923.421.805	-	-	75,93 %	99,03 %	64,01 %	87,35 %	-	-	18,09 %	3,35 %
Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	-	-	-	220.000	1.250.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,18 %	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.700.000	40.585.000	34.763.800	35.909.800	61.812.400		-	40.585.000	34.493.800	33.770.000	-	-	-	100 %	99,22 %	94,04 %	-	-	141,71 %	-8,55 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.380.050	10.739.400	58.894.100	30.012.688	70.270.000		21.905.500	8.639.400	10.615.200	9.027.000	-	-	77,19 %	80,45 %	18,02 %	30,08 %	-	-	117,83 %	-17,55 %



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jemaja serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelayanan di Kecamatan Jemaja menghadapi tantangan dari sisi kualitas dan kuantitas SDM. Beberapa perangkat kecamatan belum memiliki kompetensi yang optimal sesuai dengan tuntutan tugas, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai di beberapa bidang menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi staf yang ada.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan seperti kantor, perangkat IT, dan sarana komunikasi masih belum memadai. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil, belum dapat dilakukan secara maksimal dan efisien.

3. Pengelolaan Anggaran yang Terbatas

Anggaran operasional kecamatan yang terbatas menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.



4. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti sistem administrasi terpadu, membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jemaja juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Karakteristik Wilayah Kepulauan

Sebagai wilayah kepulauan, Kecamatan Jemaja menghadapi tantangan geografis yang cukup besar, termasuk aksesibilitas antarwilayah yang sulit dan ketergantungan pada moda transportasi laut. Hal ini memengaruhi distribusi pelayanan dan ketersediaan sumber daya di wilayah terpencil.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya peran aktif dalam pembangunan serta prosedur administratif, sehingga partisipasi mereka dalam berbagai program kecamatan masih perlu ditingkatkan.

3. Dampak Perubahan Iklim

Kecamatan Jemaja yang memiliki karakteristik pesisir menghadapi risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi. Hal ini dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Persaingan dengan Wilayah Lain

Dalam konteks pengembangan pelayanan dan pembangunan, Kecamatan Jemaja perlu bersaing



dengan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian dari pemerintah daerah..

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Jemaja dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Potensi Pariwisata dan Sumber Daya Alam

Kecamatan Jemaja memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata bahari, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan yang baik terhadap potensi ini dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik.

2. Kemajuan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi Kecamatan Jemaja untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Implementasi layanan berbasis digital, seperti e-government dan aplikasi pelayanan masyarakat, dapat mempercepat proses administrasi dan memperluas jangkauan pelayanan.

3. Dukungan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan merupakan peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Hal ini dapat mendukung keberhasilan program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.



2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, membina pemerintahan desa, dan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jemaja dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang ada seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kinerja pelayanan yang optimal dan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara mendalam untuk memahami permasalahan yang muncul dan isu strategis yang perlu ditangani.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya, Kecamatan Jemaja perlu memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan menjadi langkah penting untuk mengungkap kendala-kendala yang muncul baik dari aspek internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, Kecamatan Jemaja dapat menyusun langkah strategis yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Berikut disampaikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja, sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Pelayanan Administrasi Publik
 - Kurangnya Aksesibilitas Layanan di Wilayah Terpencil



Wilayah geografis yang sulit dijangkau menyebabkan masyarakat di desa-desa terpencil mengalami keterbatasan akses terhadap layanan administrasi seperti penerbitan dokumen kependudukan dan perizinan.

- **Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Sistem pelayanan berbasis digital belum sepenuhnya diterapkan, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada metode manual yang memakan waktu dan kurang efisien.

- **Ketidackukupan Fasilitas Pelayanan**

Beberapa fasilitas pendukung seperti kantor pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet belum memadai untuk mendukung operasional yang optimal.

2. **Permasalahan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- **Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa**

Sebagian aparatur desa belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan administrasi.

- **Koordinasi yang Belum Optimal**

Sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa belum berjalan maksimal, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan kolaborasi intensif.

3. **Permasalahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:**

- **Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata**



Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayahnya.

- Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah

Banyak program pemberdayaan yang bergantung pada anggaran dari pemerintah daerah atau pusat, sehingga keberlanjutan program sering kali terganggu jika dukungan anggaran terbatas.

4. Permasalahan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Tantangan Penegakan Peraturan di Wilayah Terpencil

Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan dan penegakan peraturan secara konsisten.

- Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
1	Pelayanan Administrasi Publik	- Kurangnya aksesibilitas layanan di wilayah perbatasan.	- Kondisi geografis yang masih belum terjangkau secara merata.
		- Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital.



No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
		- Ketidackukupan fasilitas pendukung pelayanan.	- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas.
2	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.	- Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.
		- Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa.	- Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan efektif.
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum merata.	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan.
		- Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam program pemberdayaan.	- Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan atau kemandirian masyarakat dalam menjalankan program.
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Tantangan penegakan peraturan di wilayah terpencil.	- Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan rutin.
		- Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.	- Minimnya edukasi tentang hukum dan peraturan kepada masyarakat.

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi priode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif”.

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Jemaja yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah



pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Kecamatan Jemaja melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.



2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan



trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung



Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.



Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jemaja tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, serta persaingan antardaerah dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Jemaja dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembinaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Jemaja.

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Jemaja:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa

Meningkatkan kompetensi aparatur desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan



Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

5. Stunting

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas, tingkat stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, pola asuh orang tua yang belum tepat karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan orang tua terkait kesehatan dan gizi keluarga. Kedua, petugas kesehatan tidak bisa memantau anak dengan kasus stunting secara terus-menerus, selain karena anak biasanya dirawat di rumah, petugas hanya dapat memantau sesekali saat jadwal kunjungan anak ke layanan kesehatan, atau saat dikunjungi ke rumahnya langsung. Ketiga, kondisi geografis pesisir menyebabkan terbatasnya akses terhadap air bersih atau air minum, ditambah kurangnya kesadaran terkait jamban sehat membuat air mudah tercemar. Keempat, kondisi pandemi menghalangi petugas untuk melakukan kunjungan rutin karena masyarakat takut dikunjungi. Kecamatan Jemaja memiliki balita dengan kondisi stunting sebesar 17,75%. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka stunting adalah dengan penguatan cadangan pangan di wilayah Kecamatan Jemaja

6. Kabupaten Kota Sehat

Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Sehat harus didukung oleh Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Penunjang. Desa-desa wisata yang berada di wilayah Kecamatan Jemaja memerlukan perluasan akses sanitasi yang layak. Demikian



pula dengan pemukiman warga yang memerlukan peningkatan kualitas sistem pengelolaan air dan peningkatan ketersediaan air bersih

7. Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Memperkuat penegakan hukum dan ketertiban umum melalui edukasi masyarakat serta pengawasan yang lebih efektif, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

9. Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

Mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi, dengan menyusun kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat lokal.

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Jemaja. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis isu strategis, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Jemaja menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan yang ada. Tujuan-tujuan ini disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting, potensi wilayah, dan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui pendekatan yang terukur dan strategis, tujuan dan sasaran ini menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Penetapan sasaran yang terukur dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yang relevan, mencakup berbagai aspek seperti kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran dapat dipantau secara sistematis, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi pencapaian yang telah diraih.

Melalui tabel berikut, disajikan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai setiap tahun selama periode 2025-2029. Rincian ini menjadi komitmen Kecamatan Jemaja dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan pembangunan yang inklusif. Implementasi tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Jemaja.

**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Predikat AKIP	B	B	B	BB	BB
			Nilai SAKIP	63,15	67	69	71	72
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%



3.2 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Jemaja menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran dirancang untuk mencapai hasil yang konkret dan terukur, sementara strategi dan kebijakan menjadi panduan dalam pelaksanaan program serta alokasi sumber daya. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan prioritas wilayah.

Strategi difokuskan pada upaya menyelesaikan permasalahan mendasar, memanfaatkan potensi, dan menangkap peluang pembangunan. Sementara itu, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dalam pelaksanaan strategi. Dengan sinergi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, Kecamatan Jemaja berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya secara optimal. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:

Tabel. 3.2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
Misi :	3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Tersedianya layanan yang cepat, efisien, dan terjangkau	- Mengembangkan infrastruktur pelayanan publik.	- Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan di wilayah perbatasan.
			- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Digitalisasi sistem pelayanan administrasi.



Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi :	3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Memperkuat tata kelola pemerintahan	Peningkatan kapasitas aparatur desa	- Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.	- Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur desa.
		Optimalisasi koordinasi kecamatan dan desa	- Membentuk mekanisme komunikasi dan rapat koordinasi berkala.	- Penyusunan jadwal rutin dan pedoman pelaksanaan koordinasi.
3	Mendorong partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.	- Penyusunan program edukasi pembangunan berbasis masyarakat.
		Penguatan program pemberdayaan masyarakat	- Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat berbasis ekonomi lokal.	- Penambahan dukungan teknis dan finansial untuk program pemberdayaan.

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran pembangunan Kecamatan Jemaja periode 2025-2029, telah disusun rencana program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, setiap program didukung oleh alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Pendanaan untuk pelaksanaan program-program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dukungan tambahan dari potensi sumber pendanaan lainnya. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan juga akan menjadi salah satu strategi dalam mengimplementasikan program.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Mendukung administrasi umum pemerintahan, seperti pengelolaan aset dan keuangan kecamatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelatihan dan pendampingan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menguatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembenahan tata kelola administrasi.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Menguatkan tata kelola desa melalui pelatihan aparatur dan supervisi rutin.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.3.

Tabel. 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01	KECAMATAN JEMAJA				6.365.959.384	100%	6.451.310.958	100%	6.557.829.648	100%	6.631.026.427	100%	6.711.369.352
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	6.282.959.384	100%	6.348.310.958	100%	6.419.829.648	100%	6.485.601.374	100%	6.553.369.352
	Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,80%	86,00%		88,00%		89,00%		90,00%		91,00%	
7.01.01.2.10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		69%	75%	5.940.000	87%	5.940.000	89%	10.380.000	91%	12.256.000	92%	17.884.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	6.940.000	6 Dokumen	8.328.000	7 Dokumen	12.492.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.220.000	1 Dokumen	1.220.000	1 Dokumen	1.220.000	1 Dokumen	1.464.000	1 Dokumen	2.196.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.220.000	1 Dokumen	1.220.000	1 Dokumen	1.220.000	1 Dokumen	1.464.000	1 Dokumen	2.196.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	500.000	1 Data	500.000	1 Data	500.000	1 Data	500.000	1 Data	500.000
	Penyelenggaraan Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	5.883.542.034	100%	5.947.363.206	100%	5.727.535.815	100%	5.747.314.362	100%	5.838.921.548
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan	5.704.742.034	64 Orang/Bulan	5.768.163.206	64 Orang/Bulan	5.546.059.815	64 Orang/Bulan	5.565.562.362	64 Orang/Bulan	5.656.175.948
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	176.040.000	12 Dokumen	176.440.000	12 Dokumen	178.440.000	12 Dokumen	178.440.000	12 Dokumen	178.440.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.760.000	1 Laporan	2.760.000	1 Laporan	3.036.000	1 Laporan	3.312.000	1 Laporan	4.305.600

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	-	100%	10.480.000	100%	10.480.000	100%	10.480.000	100%	10.480.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	10.480.000	2 Laporan	10.480.000	2 Laporan	10.480.000	2 Laporan	10.480.000
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	21.052.000	100%	37.104.000	100%	131.429.623	100%	138.221.600	100%	167.343.760
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	70.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	90.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	5.773.623	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	21.052.000	2 Orang	37.104.000	2 Orang	55.656.000	2 Orang	61.221.600	2 Orang	67.343.760
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	268.622.592	100%	231.618.400	100%	289.005.928	100%	316.756.208	100%	350.034.426
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	5.000.890	1 Paket	5.000.890	1 Paket	5.500.979	1 Paket	6.051.077	1 Paket	6.656.185
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	2 Paket	7.583.773	2 Paket	8.342.150	2 Paket	9.176.365	2 Paket	12.846.911
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.771.182	2 Paket	10.023.773	2 Paket	11.026.150	2 Paket	12.128.765	2 Paket	13.341.642
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.770.120	3 Paket	30.502.840	3 Paket	33.553.124	3 Paket	36.908.436	3 Paket	40.599.280
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	20.174.400	1 Paket	11.503.124	1 Paket	11.503.124	1 Paket	11.503.124	1 Paket	11.503.124
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	39.200.000	4 Laporan	25.500.000	4 Laporan	28.050.000	4 Laporan	30.855.000	4 Laporan	33.940.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	161.706.000	12 Laporan	141.504.000	12 Laporan	191.030.400	12 Laporan	210.133.440	12 Laporan	231.146.784
7.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	5.311.400	100%	26.700.201	100%	150.370.221	100%	155.407.243	100%	60.947.967
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	5.311.400	2 Unit	26.700.201	2 Unit	150.370.221	10 Unit	155.407.243	10 Unit	60.947.967

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	82.641.358	100%	73.255.151	100%	84.289.061	100%	88.289.061	100%	90.289.061
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	45.751.758	12 Laporan	35.892.763	12 Laporan	44.926.673	12 Laporan	46.926.673	12 Laporan	48.926.673
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.269.600	12 Laporan	11.742.388	12 Laporan	13.742.388	12 Laporan	15.742.388	12 Laporan	15.742.388
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.620.000	12 Laporan	25.620.000	12 Laporan	25.620.000	12 Laporan	25.620.000	12 Laporan	25.620.000
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	15.850.000	100%	15.850.000	100%	16.339.000	100%	16.876.900	100%	17.468.590
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	4.890.000	1 Unit	4.890.000	1 Unit	5.379.000	1 Unit	5.916.900	1 Unit	6.508.590
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	10.960.000	8 Unit	10.960.000	8 Unit	10.960.000	8 Unit	10.960.000	8 Unit	10.960.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	70%	74%	15.000.000	75%	15.000.000	77%	30.000.000	78%	30.000.000	78%	50.000.000
7.01.02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di		70%	74%	15.000.000	75%	15.000.000	77%	30.000.000	78%	30.000.000	78%	50.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	50%	52%	350.161.886	55%	351.702.020	56%	351.702.020	58%	351.702.020	65%	351.702.020
7.01.03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		50%	52%	350.161.886	55%	351.702.020	56%	351.702.020	58%	351.702.020	65%	351.702.020
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	350.161.886	4 Laporan	351.702.020	4 Laporan	351.702.020	4 Laporan	351.702.020	4 Laporan	351.702.020

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	75%	77%	2.000.000	80%	5.000.000	80%	5.000.000	82,00%	6.000.000	82%	10.000.000
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		75%	77%	2.000.000	80%	5.000.000	80%	5.000.000	82%	6.000.000	82%	10.000.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	10.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70%	73%	18.000.000	74%	20.000.000	75%	55.000.000	0,77	55.000.000	0,8	70.000.000
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		70%	73%	18.000.000	74%	20.000.000	75%	55.000.000	77%	55.000.000	80%	70.000.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Orang	10 Orang	18.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	55.000.000	10 Orang	55.000.000	10 Orang	70.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
	Meningkatnya Fasilitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	63.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100%	84.425.053	100%	78.000.000
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>		100%	100%	63.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100%	84.425.053	100%	78.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	10.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	10.000.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	58.000.000	1 Laporan	58.000.000	1 Laporan	54.425.053	1 Laporan	58.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01	KELURAHAN LETUNG				782.558.000	100	792.558.000	100	801.858.000	100	801.858.000	100	813.858.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	69%	75%	137.058.000	87%	137.058.000	89%	139.058.000	91%	139.058.000	92%	141.058.000
	Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,80%	86,00%		88,00%		89,00%		90,00%	91,00%		
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		69%	75%	105.118.000	87%	105.118.000	89%	107.118.000	91%	107.118.000	92%	109.118.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	4.098.000	1 Paket	4.098.000	1 Paket	4.098.000	1 Paket	4.098.000	1 Paket	4.098.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.000.000	2 Paket	4.000.000	2 Paket	4.000.000	2 Paket	4.000.000	2 Paket	4.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	14.020.000	3 Paket	14.020.000	3 Paket	14.020.000	3 Paket	14.020.000	3 Paket	14.020.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	13.000.000	4 Laporan	13.000.000	4 Laporan	13.000.000	4 Laporan	13.000.000	4 Laporan	13.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	64.000.000
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		69%	75%	23.400.000	87%	23.400.000	89%	23.400.000	91%	23.400.000	92%	23.400.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000	12 Laporan	8.400.000	12 Laporan	8.400.000	12 Laporan	8.400.000	12 Laporan	8.400.000
7.01.01 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		69%	75%	8.540.000	87%	8.540.000	89%	8.540.000	91%	8.540.000	92%	8.540.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	4.890.000	1 Unit	4.890.000	1 Unit	4.890.000	1 Unit	4.890.000	1 Unit	4.890.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	3.650.000	4 Unit	3.650.000	4 Unit	3.650.000	4 Unit	3.650.000	4 Unit	3.650.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	79%	81%	645.500.000	83%	655.500.000	84%	662.800.000	85%	662.800.000	87%	672.800.000
7.01.03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		79%	81%	645.500.000	83%	655.500.000	84%	662.800.000	85%	662.800.000	87%	672.800.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	5.000.000	5 Lembaga Masyarakat	5.000.000	5 Lembaga Masyarakat	5.000.000	5 Lembaga Masyarakat	5.000.000	5 Lembaga Masyarakat	5.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	440.500.000	3 Pokmas / Ormas	450.500.000	3 Pokmas / Ormas	457.800.000	3 Pokmas / Ormas	457.800.000	3 Pokmas / Ormas	467.800.000
					7.148.517.384		7.243.868.958		7.359.687.648		7.432.884.427		7.525.227.352



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kecamatan Jemaja terus berupaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, berbagai program dan kegiatan telah dijalankan untuk mendukung fungsi utama kecamatan, seperti koordinasi pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, dan penyediaan layanan administrasi. Melalui optimalisasi sumber daya dan penerapan teknologi informasi, penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Jemaja menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik dalam hal efisiensi waktu maupun peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat, telah menghasilkan capaian positif dalam menjaga ketertiban umum serta memperkuat sinergi pembangunan. Pendekatan partisipatif juga diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Jemaja untuk terus meningkatkan kinerja di seluruh bidang urusan, guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang inklusif.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:



Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat AKIP	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	
2	Nilai SAKIP	Nilai	60,10	63,15	67	69	71	72	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Persentase	70%	75%	80%	85%	87%	90%	

Tabel ini mencerminkan komitmen Kecamatan Jemaja dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP	BAIK	60,10	63,15	67	69	71	72	72
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	BAIK	70%	75%	80%	85%	87%	90%	90%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,60	82	86	88	89	90	91	91



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jemaja periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dokumen ini mencerminkan komitmen Kecamatan Jemaja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang dimiliki serta mengantisipasi tantangan yang ada, Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi tercapainya tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Dengan semangat kerja sama dan komitmen yang tinggi, Kecamatan Jemaja optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah kecamatan.

Letung, 8 September 2025

Pt. CAMAT JEMAJA,



Edison Z, S.Pd.SD

Penata Tk.I

NIP. 197006161993041001